

**PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN DITINJAU DARI VALUE FOR MONEY
AUDIT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI KELURAHAN WILAYAH SURAKARTA)**

MAYA WIDYANA DEWI*)

INDRA LILA KUSUMA)**

***)**) Dosen STIE-AAS Surakarta**

Email : widyamine77@gmail.com*), i_lilakusuma@yahoo.com))**

ABSTRACT

This study aims to determine the management of Raskin program to improve the welfare of the community and management of Raskin program when viewed from the Value For Money Audit to improve the welfare of the community. This research is a descriptive qualitative research focused on one phenomenon that is chosen and want to be understood in depth by ignoring other phenomena, in this case that is management of raskin program. This study uses data analysis techniques in the form of data presentation techniques and analyzed based on economic calculation, efficiency and effectiveness. A collection of information is compiled, thus giving the possibility of drawing the conclusion of the form of presentation of qualitative data in the form of narrative text. To answer the problem formulation that is about the management of Raskin program from Value for Money Audit for the welfare of the community, the researcher uses some secondary data in the form of literature of literature derived from various sources related to the discussion that want to be studied in this research such as the report of APBD 2015 and 2016 region Surakarta, books, scientific journals, electronic media, and updated media. In addition, primary data were also obtained from interviews to Raskin recipients and Raskin managers at the Surakarta district level. The results of this study indicate that (1) Implementation of Raskin program management is in accordance with the provisions in Raskin General Guidelines, (2) Implementation of Raskin program management in terms of Value for Money Audit economics has been achieved, But when viewed from the side of Raskin program as a program from the government for alleviating the poverty of the community is clearly not going well because the funds budgeted for the community are not fully accepted by the community, (3) The implementation of Raskin program management in terms of the efficiency of Value for Money Audit has been achieved. But if we look at the side of the Raskin program, then this is considered not good because it is expected with the use of large funds it is expected that the funds can be discharged evenly to all poor families in Surakarta, (4) Implementation of Raskin program management in terms of effectiveness Value for Money Audit has been reached. Although there is still no perfect effectiveness value of any performance indicator in the management of Raskin program, because only the accuracy of price and accurate measurements are effective.

Keywords: Raskin Program, Value for Money Audit, Public Welfare

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perekonomian global mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Sedangkan tingkat harga yang tinggi, akhir-akhir ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan barang konsumsi lainnya, sehingga hal ini menyebabkan daya beli masyarakat semakin berkurang. Hal tersebut dialami oleh Indonesia saat ini, bahkan kondisi ekonomi yang demikian dirasakan hingga tingkat regional. Banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan masyarakat yang termasuk golongan *mid-end* (menengah ke bawah) semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun hanya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan serta pendidikan.

Pemerintah berupaya untuk menahan laju penurunan taraf kehidupan yang berkelanjutan terutama bagi keluarga miskin (GAKIN) dalam rangka menghadapi perekonomian global. Salah satu diantaranya adalah melakukan program subsidi. Ada beberapa jenis subsidi dalam APBN yang secara umum dibedakan menjadi dua yaitu subsidi energi (BBM, listrik) dan subsidi non-energi (pupuk, pangan, PSO dan yang lainnya).

Program pemerintah yang dilakukan secara berkesinambungan adalah subsidi pangan. Awalnya subsidi pangan dilatarbelakangi krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi terjadi, Indonesia mengalami musim kemarau dan serangan hama sehingga menyebabkan penurunan produksi pangan. Kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama semakin menurunkan produksi pangan. Ini menyebabkan penurunan produksi beras sehingga harga beras meningkat secara signifikan. Kenaikan harga beras menjadikan daya beli masyarakat menurun sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membeli beras. Kondisi seperti ini mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Pada 3 Juni 1998 pemerintah membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan. Selanjutnya ditunjuklah Bulog untuk melaksanakan program bantuan pangan dalam bentuk OPK (Operasi Pasar Khusus). Mulai tahun 2002 nama program ini berganti menjadi RASKIN (Beras Untuk Keluarga Miskin).

Raskin merupakan program pemerintah di bidang sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Pelaksanaan program dan pertanggungjawaban pada pengelolaannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan. Dalam rangka meninjau dari segi *Value for Money Audit* maka perlu diadakan audit kinerja atas pelaksanaannya.

Selanjutnya akan terlihat apakah program raskin ini ekonomis, efisien, efektif dan atau tidak, dan akan terlihat pula kendala-kendala apa saja yang ada selama pelaksanaannya.

Audit kinerja menjadi hal yang terpenting sebagai bagian atau elemen yang dapat menilai atau mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap program raskin ini. Ketertarikan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program raskin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen audit kinerja tersebut, membuat hal ini dijadikan sebagai penelitian untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang terjadi dan berpotensi menghambat keberhasilan program raskin.

Berdasarkan uraian diatas, maka akhirnya menarik minat untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Program Raskin Ditinjau dari *Value For Money Audit* untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan program Raskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimanakah pengelolaan program Raskin ditinjau dari *Value For Money Audit* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. pengelolaan program Raskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengelolaan program Raskin jika ditinjau dari *Value For Money Audit* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

Program Raskin

Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin (Tabor and Sawit, 2001). Program Raskin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus) yang berfungsi sebagai program darurat (*social safety net*) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin setelah krisis moneter terjadi tahun 1997.

Pada tahun 2002 fungsi program diperluas sebagai perlindungan sosial masyarakat (*social protection*) dan namanya diubah menjadi Raskin agar lebih tepat sasaran (Bulog, 2010a). Pagu raskin yang diberikan sekarang adalah 15 kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600/KK/bulan (Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, 2007 dan 2008).

Value For Money Audit

Karakteristik Value For money Audit

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efiseinsi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan criteria/standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak pengguna laporan tersebut (malan, 1984)

Audit kerja mengfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja organisasi. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis unutt memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obkektif, agar dapat melakukan penilaian serta independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapain hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hokum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang dicapai dengan

kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak – pihak pengguna laporan tersebut (Malan, 1984).

Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien , dan efektivitas sendiri – sendiri. Suatu hal yang membedakan VFM audit dengan *conventional audit* adalah dalam hal laporan audit. *Conventional audit* adalah dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan criteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Audit Ekonomi dan Efisiensi

Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumberdaya yang ada dapat capai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumberdaya yang sekecil – kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien; (2) penyebab terjadinya praktik – praktik yang tidak ekonomis atau efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

Auditor mengukur efisiensi berdasarkan criteria yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan: (1) Standar yang telah ditetapkan sebelumnya, (2) Kinerja tahun-tahun sebelumnya, (3) unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi sama dengan jenis audit yang lainnya. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi: (1) Perencanaan audit (2) *Me review* sistem akuntansi dan pengendalian intern, (3) Menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, (4) Melaksanakan audit, (5) Menyampaikan laporan.

Audit Efektivitas

Audit efektifitas (audit program) bertujuan untuk menentukan: (1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan (2) kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya (3) apakah yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa (konsumen). untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada criteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan *top manajemen* dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan criteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program.

Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu cara dimana suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Kebutuhan masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik yang dalam hal lain disebut kebutuhan sosial atau kultural. (Sosiawan, 2003). Kesejahteraan masyarakat juga sering diidentikkan dengan kesejahteraan sosial yang dapat didefinisikan juga sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang. (Dunham dalam Sutiarso, 2004).

Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Komponen-komponen pengukuran kesejahteraan yang diuraikan oleh BKKBN (1993) mencakup diantaranya :

1. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam lingkungan kerja.
3. Kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi, dsb.
4. Kemampuan untuk memberi sumbangan atau partisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

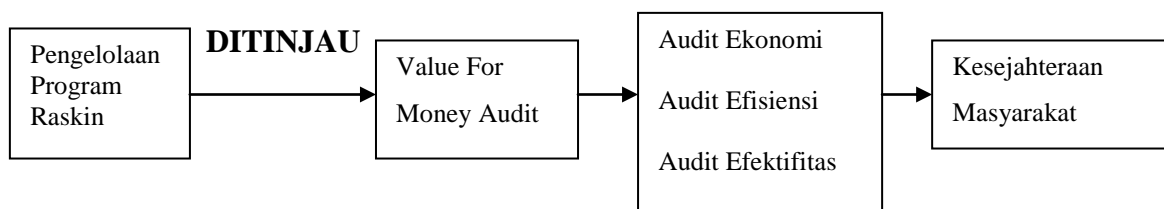
Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran kesejahteraan masyarakat yang diamati indikator kesejahteraan oleh BKKBN yang menyatakan bahwa minimal keluarga sejahtera dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan serta memiliki interaksi yang baik terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan teoritis yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah :

1. Penelitian Hutagaol dan Amara (2008), tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pelaksanaan Raskin di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2007
2. Penelitian Bungaes (2013), tentang Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Penelitian Isna Ardila, tentang Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Value For Money* pada Pengadiln Negeri Tebing Tinggi.

C. KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

Hasil kinerja merupakan keseluruhan dari evaluasi hasil kerja suatu kegiatan, dalam hal ini adalah pengelolaan program Raskin. Penilaian kinerja didasarkan dari pengukuran sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomis

Sumber daya sebaiknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \text{target anggaran} - \text{realisasi anggaran}$$

Pengelolaan program raskin dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan atau 100%. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan menggunakan sumber daya (*input*) yang disediakan. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Dalam pengukuran kinerja *Value for Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi, efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Suatu kinerja organisasi dikatakan efisien apabila keluaran (*output*) yang dihasilkan mencapai target yang direncanakan atau lebih besar daripada sumber daya (*input*) yang telah digunakan.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu melainkan hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{capaian kinerja}}{\text{target}} \times 100\%$$

Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program/kegiatan yang telah direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian aktual tentang program raskin terutama di kelurahan-kelurahan di wilayah kota Surakarta sebagai tingkat pengelolaan terendah dari program raskin di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan program raskin khususnya di kelurahan-kelurahan wilayah Surakarta dengan peninjauan di tiga faktor dalam yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Dengan pengamatan pelaksanaan pengelolaan program raskin dapat dikatakan bahwa semua sudah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Umum Raskin, yaitu tentang mekanisme pelaksanaan Raskin dimulai dari penetapan pagu raskin, penetapan daftar penerima manfaat, pelaksanaan penyaluran, pembayaran harga tebus, kemudian yang terakhir adalah raskin sampai ke tangan RTM.

Peninjauan dari segi *Value for Money audit* dilakukan dengan tiga pengukuran yaitu :

1. Ekonomis

Berdasarkan analisis dari data sekunder maka didapatkan suatu keekonomisan dalam program raskin. Hal ini terlihat dari pengukuran antara besarnya anggaran untuk program raskin dengan realisasi anggaran raskin di Surakarta. Pada tahun 2015 dan 2016 pemerintah kota Surakarta telah mengalokasikan dana raskin masing-masing sebesar 9 milyar, tetapi pada kenyataannya dana yang terserap oleh masyarakat hanya sebesar 8 milyar. Dari sisi ekonomis hal ini sudah dapat tercapai karena ada penghematan sebesar 1 milyar setiap tahunnya. Tetapi apabila dilihat dari sisi program raskin sebagai program dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat jelas tidak berjalan dengan baik karena dana yang dianggarkan untuk masyarakat tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi bukan karena mekanisme pelaksanaan program raskin tetapi terjadi selisih data penerima raskin antara pendataan yang sudah dilakukan oleh kelurahan dengan realisasi data di lapangan. Data penerima raskin tahun 2015 tercatat sebanyak 17.225 RTS. Namun, setelah diverifikasi, RTS tinggal 14.510 RTS. Sedangkan 2.715 RTS tidak ditemukan di antaranya karena meninggal dunia, nama ganda, dan sudah pindah tempat. Tahun 2016 tercatat 17.210 rumah tangga sasaran penerima manfaat, tetapi realisasinya hanya 15.617 keluarga miskin di Surakarta yang menerima jatah beras miskin.

2. Efisiensi

Hasil analisis data yang telah dilakukan menghasilkan nilai efisiensi sebagai berikut : tahun 2015 didapatkan hasil input dari prosentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan output sebesar 88,89%, sedangkan nilai *output* didapat dari persentase pencapaian fisik pada setiap tahun kegiatan yaitu 84,24% sehingga nilai efisiensi program raskin di Surakarta tahun 2015 adalah 94,77%. Tahun 2016 nilai *input* tetap sama yaitu 88,89%, nilai *output* 90,74% dan nilai efisiensi 102,08%.

Dari hasil tersebut terlihat ada peningkatan nilai efisiensi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yaitu 7,31%, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah realisasi keluarga miskin penerima raskin tetapi justru terjadi penurunan data keluarga penerima raskin dari 17.225 menjadi 17.210.

Pada tahun 2015 belum tercapai output yang maksimal dengan prosentasi nilai efisiensi kurang dari 100%, sedangkan pada tahun 2016 nilai efisiensi telah tercapai melebihi 100%. Dilihat dari audit efisiensi maka dapat dikatakan bahwa dengan penggunaan *input* (anggaran raskin) seminimal mungkin dapat menghasilkan *output* (pemerataan terhadap keluarga miskin) yang maksimal.

Sebaliknya jika kita melihat dari sisi program raskin, maka hal ini dirasa kurang baik karena diharapkan dengan penggunaan dana yang besar maka diharapkan dana tersebut dapat dialokasikan secara merata kepada semua keluarga miskin di Surakarta. Jadi dana yang dianggarkan untuk program raskin dapat habis dirasakan oleh keluarga miskin di Surakarta.

3. Efektifitas

Audit efektivitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lima indikator penilaian kinerja pengelolaan program raskin, yaitu:

- a. Audit ketepatan sasaran penerima manfaat, hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dan memiliki kartu Raskin.
- b. Audit ketepatan jumlah, jumlah yang merupakan hak penerima manfaat adalah 15kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.
- c. Audit ketepatan harga, harga beras adalah 24.000 rupiah per 15 kg netto di titik distribusi.
- d. Audit ketepatan waktu, sesuai dengan waktu rencana distribusi.
- e. Audit ketepatan administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar.

Dari pengamatan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh capaian kinerja pengelolaan program raskin di kelurahan wilayah Surakarta sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. Audit ketepatan sasaran | = 85% |
| b. Audit ketepatan jumlah | = 100% |
| c. Audit ketepatan harga | = 100% |
| d. Audit ketepatan waktu | = 70% |
| e. Audit ketepatan administrasi | = 87% |

Sedangkan target untuk setiap indikator penilaian kinerja adalah 100%.

Hasil perhitungan efektifitas untuk setiap indikator penilaian kinerja adalah:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| a. Audit ketepatan sasaran | = 85% |
| b. Audit ketepatan jumlah | = 100% |
| c. Audit ketepatan harga | = 100% |
| d. Audit ketepatan waktu | = 70% |
| e. Audit ketepatan administrasi | = 87% |

Pelaksanaan program raskin dapat dikatakan telah berjalan efektif, dengan tingkat keberhasilan nilai efektifitas rata-rata untuk tiap indikator penilaian kinerja adalah 88,4%.

4. Peninjauan Value for Money Audit terhadap pengelolaan program raskin untuk kesejahteraan masyarakat

Hasil analisis dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan pengelolaan program raskin untuk kesejahteraan masyarakat, karena ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki di dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. Pendataan penerima raskin belum terverifikasi dengan baik.
- b. Terdapat penghematan dari anggaran program raskin yang seharusnya habis dialokasikan ke semua keluarga miskin
- c. Pengelolaan raskin yang berkaitan dengan lima indikator kinerja belum sempurna secara keseluruhan karena terlihat dari nilai efektifitasnya, dimana hanya ada dua indikator yang sudah dilaksanakan secara efektif yaitu ketepatan jumlah dan ketepatan harga, dimana dua indikator ini sudah disesuaikan dengan Panduan Umum Raskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan program raskin sudah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Umum Raskin, yaitu tentang mekanisme pelaksanaan Raskin dimulai dari penetapan pagu raskin, penetapan daftar penerima manfaat, pelaksanaan penyaluran, pembayaran harga tebus, kemudian yang terakhir adalah raskin sampai ke tangan RTM.
2. Pelaksanaan pengelolaan program raskin ditinjau dari keekonomisan *Value for Money Audit* telah tercapai, Tetapi apabila dilihat dari sisi program raskin sebagai program dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat jelas tidak berjalan dengan baik karena dana yang dianggarkan untuk masyarakat tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat.
3. Pelaksanaan pengelolaan program raskin ditinjau dari efisiensi *Value for Money Audit* telah tercapai. Tetapi jika kita melihat dari sisi program raskin, maka hal ini dirasa kurang baik karena diharapkan dengan penggunaan dana yang besar maka diharapkan dana tersebut dapat habis dialokasikan secara merata kepada semua keluarga miskin di Surakarta.
4. Pelaksanaan pengelolaan program raskin ditinjau dari efektifitas *Value for Money Audit* telah tercapai. Walaupun masih belum tercapai nilai efektifitas yang sempurna dari setiap indikator penilaian kinerja dalam pengelolaan program raskin, karena hanya ketepatan harga dan ketepatan jumlah yang terukur efektif.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan program raskin terutama jika ditinjau dari *Value for Money Audit* untuk kesejahteraan masyarakat di kelurahan wilayah Surakarta, sehingga perlu adanya saran untuk menindaklanjuti kekurangan dari hasil penelitian ini.

1. Bagi pengelola program raskin yang ada di kelurahan di wilayah Surakarta
 - a. Pendataan penerima raskin sebaiknya dilakukan tidak hanya di awal pelaksanaan saja, tetapi juga dilaksanakan verifikasi data serta evaluasi data

- penerima raskin agar tidak terjadi selisih jumlah penerima raskin antara data dengan realisasinya yang berdampak pada pengalokasian anggaran raskin.
- b. Pengelolaan program raskin di tingkat kelurahan khususnya di wilayah Surakarta seharusnya dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh tingkatan pemerintah yang ada di atasnya, sehingga hal ini akan meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan program raskin dan tercapainya nilai efektifitas yang tinggi dalam indikator-indikator pengelolaan program raskin
2. Bagi penelitian selanjutnya
Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih bervariasi di dalam menentukan variabel-variabel dalam penelitian yang berbasis pada sektor publik khususnya dalam mengupas tentang pelaksanaan program pemerintah, dimana bukan hanya ditinjau dari Value for Money Audit saja tetapi bisa ditinjau dari perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim, 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Amang, B., 1994. *Pengendalian Pangan dan Harga*. Jakarta: Dharma Karsa Utama
- Andayani, Wuryan, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Banyumedia
- Anonimus, 2007. *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007*. Jakarta
- BULOG, 2012. *Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum BULOG
- Bungkaes, Heri Risal. 2013. *Hubungan Aktivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan. Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Acta Diurna Edisi April 2013
- Hutagaol, Amara. 2008. Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pelaksanaan Raskin di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2007. *Jurnal Agro Ekonomi Volume 26 No.2*. Institut Pertanian Bogor.
- I Gusti Agung Rai, 2004. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Isna Ardilla, 2015. *Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Remi, S.S., dan P. Tjiptoherijanto, 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Shin Auly Frida S, 2011. Efektifitas Pelaksanaan Raskin, *Skripsi*, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang
- Sosiawann Harry Pungguh. 2003 Telaah Tentang Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial (Pandangan 6 Fraksi MPR dalam Proses Amandemen Ke 4 Pasal 34 UUD1945). *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sutiarso, Irwan, Warella dan Susi Sulandari. 2004. *Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PKK) di Kecamatan Tempuran, Kabupaten*

- Magelang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik U* s
Diponegoro, Semarang
- Winria Pitapurwati, 2014. Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. *Skripsi*, Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.
- Yanita Sari, 2007. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin. *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara.